



RENCANA KERJA TAHUN 2020

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:
Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Koordinator Bidang
Pemerintahan

Petugas Verifikator

ttd

ttd

ARIS GUNAWAN, SIP, SE, M.Ec, Dev.MA
NIP. 19771107 199703 1 002

NUNUNG NUR CHAYATI, S.Pi, MT, MSc
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui,
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,

ttd

RIPTO SUSILO, SH, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juni 2019

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197310081992032001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2018	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2018	8
dan Capaian Renstra Dinkominfo	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	49
Fungsi Dinkominfo	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINKOMINFO	63
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo	63
3.3 Program dan Kegiatan	64
3.4 Inovasi Perangkat Daerah	73
BAB IV. PENUTUP	75
Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo & Capaian Renstra s.d Tahun 2018
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.3 : Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 2.4 : Perkembangan Laju Inflasi Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
- Tabel 2.5 : PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2014-2018
- Tabel 2.6 : Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018
- Tabel 2.7 : Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 2.8 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2014-2018
- Tabel 2.9 : Predikat Indeks SPBE
- Tabel 2.10 : Nilai Indeks SPBE Tahun 2018 hasil penilaian dari Kemenpan RB
- Tabel 2.11 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 2.12 : Nilai Monev Website Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2018
- Tabel 2.13 : Instrumen SAQ Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2018
- Tabel 2.14 : Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 2.15 : Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.16 : Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018
- Tabel 2.17 : KIM Kecamatan Bulu Tahun 2017
- Tabel 2.18 : KIM Kecamatan Jumo Tahun 2018
- Tabel 2.19 : Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran Tahun 2014-2018
- Tabel 2.20 : LPP di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.21 : Lokasi area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2014-2018
- Tabel 2.22 : Lokasi area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet s.d tahun 2018
- Tabel 2.23 : Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab. Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 2.24 : Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018
- Tabel 2.25 : Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018
- Tabel 2.26 : Sistem Informasi yang Terintegrasi tahun 2018

- Tabel 2.27 : Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018
- Tabel 2.28 : Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Akhir Tahun 2018
- Tabel 2.29 : Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 2.30 : Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 2.31 : Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
- Tabel 2.32 : Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.33 : Hasil TT Security Assesment oleh BSSN di Kabupaten Temanggung Tahun 2018
- Tabel 2.34 : Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020
- Tabel 3.35 : Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 4.36 : Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo
- Tabel 3.37 : Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

BAB I PENDAHULUAN

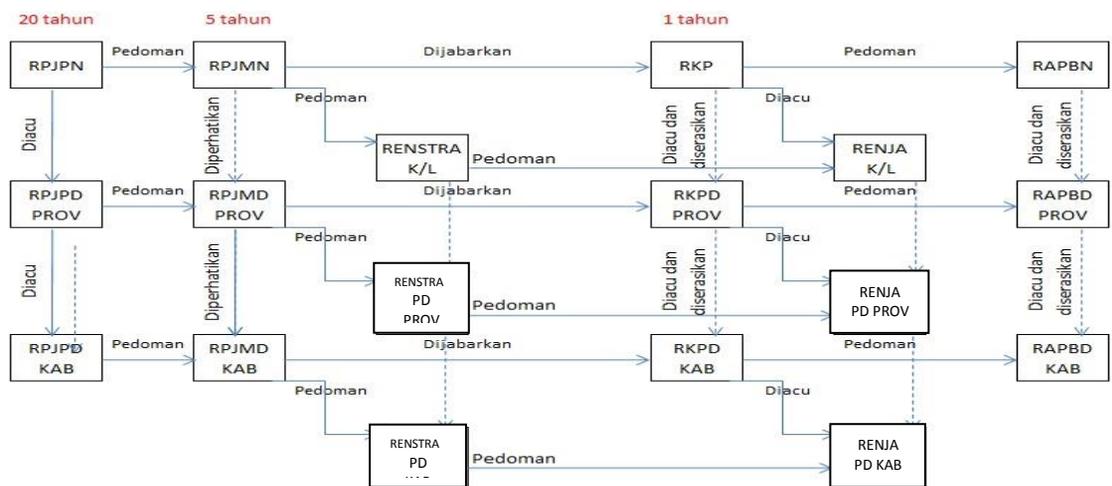
1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun kedua RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan perangkat daerah dan rencana pembangunan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja Dinkominfo Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinkominfo Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1.1.1. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinkominfo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Dinkominfo;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2018;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai Renstra Dinkominfo;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Dinkominfo;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lain terkait pelayanan informasi publik.

1.1.2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun 2018

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan informasi publik.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1.1.3. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinkominfo

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkominfo.

1.1.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinkominfo. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan informasi publik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan informasi publik;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkominfo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan informasi publik;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinkominfo;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

1.1.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Dinkominfo.

1.1.6. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020.

1.1.7. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo.

1.1.8. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo dalam pembangunan daerah.

1.1.9. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinkominfo

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinkominfo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

1.1.10. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

1.1.11. Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo

Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

1.1.12. Pembahasan forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

1.1.13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.1.14. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

1.1.15. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

1.1.16. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Dinkominfo dengan dokumen RKPD

Dokumen rancangan akhir Renja Dinkominfo disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Dinkominfo Kab. Temanggung.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
27. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Nomor 527 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinkominfo untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Dinkominfo Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinkominfo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinkominfo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinkominfo
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINKOMINFO

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan informasi.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 lembar berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo
& Capaian Renstra s.d Tahun 2018

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BELANJA						4.213.227.285		18.130.200.632	9.637.895.480		9.512.240.653							
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						2.001.976.561		1.383.200.632	2.221.021.480		2.169.795.467							
	BELANJA PEGAWAI																		
a.	Belanja pegawai						1.479.896.894		1.383.200.632	1.589.358.680		1.547.439.867							
b.	Tambahan Penghasilan PNS						522.079.667		-	631.662.800		622.355.600							
B	BELANJA LANGSUNG						2.211.250.724		16.747.000.000	7.416.874.000		7.342.445.186						93,01	
I	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				373.354.976		132.181.976		317.000.000	241.173.000		231.024.390	100	95,29		363.206.366	95,83	96,36	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening air, listrik dan telpon/fax	bulan	24	13.832.177	12	3.332.177	12	45.000.000	10.500.000	12	6.423.225	100	61,17	24	9.755.402	100	70,53	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran Perizinan Kendaraan	bulan	24	73.684.879	12	26.959.879	12	50.000.000	46.725.000	12	45.779.739	100	97,98	24	72.739.618	100	98,72	
c	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya peralatan dan bahan kebersihan untuk kantor	bulan	24	38.667.300	12	1.383.000	12	3.000.000	37.284.300	12	33.704.212	100	90,40	24	35.087.212	100	90,74	
d	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan administrasi	bulan	24	21.400.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12.400.000	12	12.400.000	100	100	24	21.400.000	100	100	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	24	16.999.875	12	8.999.875	12	9.000.000	8.000.000	12	8.000.000	100	100	24	16.999.875	100	100	
f	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	24	11.995.000	12	4.495.000	12	7.500.000	7.500.000	12	7.500.000	100	100	24	11.995.000	100	100	
g	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya biaya untuk pembelian peralatan rumah tangga	bulan	24	9.998.450	6	4.998.450	12	5.000.000	5.000.000	12	4.932.500	100	98,65	18	9.930.950	75,00	99,32	
h	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	bulan	24	3.900.000	12	1.200.000	12	3.500.000	2.700.000	12	2.676.600	100	99,13	24	3.876.600	100	99,40	
i	Penyediaan makanan dan Minuman	tersedianya minuman harian pegawai dan jamuan rapat/tamu	bulan	24	35.375.050	12	15.375.050	12	25.000.000	20.000.000	12	19.954.400	100	99,77	24	35.329.450	100	99,87	
j	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	24	71.364.500	12	29.784.500	12	40.000.000	41.580.000	12	41.572.516	100	99,98	24	71.357.016	100	99,99	
k	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	24	13.700.000	12	3.000.000	12	10.000.000	10.700.000	12	10.695.000	100	99,95	24	13.695.000	100	99,96	
l	Jasa Pelayanan Perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan perkantoran	bulan	24	62.437.745	6	23.654.045	12	110.000.000	38.783.700	12	37.386.198	100	96,40	18	61.040.243	75,00	97,76	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				258.682.900		32.987.500		548.000.000	222.434.900		220.250.000		95,44		253.237.500		105,73	
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya biaya untuk pembelian perlengkapan gedung kantor	keg.	16	177.275.000	6	30.000.000	10	400.000.000	147.275.000	10	145.860.000	100	99,04	16	175.860.000	100	99,20	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan kantor	keg.	7	50.000.000	-	-	7	100.000.000	48.300.000	7	47.590.000	100	98,53	7	47.590.000	100	95,18	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	18.400.000	-	-	12	20.000.000	18.400.000	12	19.091.500	100	100	12	19.091.500	100	100	
d	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya biaya untuk pemeliharaan gedung kantor	bulan	18	3.000.000	6	2.987.500	12	3.000.000	3.000.000	12	2.308.500	100	76,95	18	5.296.000	100	176,53	
e	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya biaya untuk pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	10.007.900	-	-	12	25.000.000	5.459.900	12	5.400.000	100	98,90	12	5.400.000	100	53,96	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				7.000.000		-		7.000.000	7.000.000		6.250.000	89,29	89,29			89,29	89,29	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai	setel	28	7.000.000	-	-	28	7.000.000	7.000.000	25	6.250.000	89,29	89,29	25	6.250.000	89,29	89,29	
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				2.397.663.000		675.469.093		2.170.000.000	1.756.964.000		1.747.288.618		98,90		2.422.757.711		107,70	
a	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Pengembangan fungsi alat studio kominfo sbg sarana pengembangan SDM dalam bidang TIK	paket	1	75.000.000	1	29.990.000	1	60.000.000	38.500.000	1	37.920.080	100	98,49	2	67.910.080	200	90,55	
b	Pemeliharaan Alat Studio	Terpeliharanya peralatan studio Kominfo	bulan	24	18.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000	19.210.000	12	19.210.000	100	100	24	29.210.000	100	162,28	
c	Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan pengembangan dan penguasaan inovasi TIK oleh masyarakat	keg.	3	43.960.000	1	19.000.000	1	-	24.960.000	1	24.960.000	100	100	2	43.960.000	66,67	100	
d	Diseminasi Informasi Melalui Pentas Seni FK Mitra	Diseminasi informasi kpd masyarakat melalui media pertunjukan rakyat	keg.	6	30.000.000	4	19.950.000	4	100.000.000	99.840.000	4	98.730.000	100	98,89	8	118.680.000	100	100	
e	Pengadaan jaringan LPSE dan Online SKPD	Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet	Mbps	590	2.156.049.000	130	596.529.093	460	1.900.000.000	1.499.800.000	460	1.494.531.884	100	99,65	590	2.091.060.977	100	96,99	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
f	Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan dan data	bulan	12	74.654.000	0	-	12	90.000.000	74.654.000	12	71.936.654	100	96,36	12	71.936.654	100	96,36	
5	Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika				164.283.000		9.953.012		150.000.000	118.230.000		115.859.944		97,84		125.812.956		82,68	
a	Pemeliharaan dan operasional pusat komunikasi kreatif	Operasional Pusat komunikasi kreatif, peningkatan literasi TIK, UMKM dan masyarakat, pengenalan dan pemanfaatan e-bisnis oleh masyarakat	kegiatan/bulan	24	115.000.000	12	12	12	100.000.000	78.900.000	12	77.559.944	100	98,30	24	77.559.956	100	67,44	
b	Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo	Tercapainya lembaga penyiaran yang menjunjung tinggi norma dan etika penyiaran	kegiatan	4	49.283.000	2	9.953.000	2	50.000.000	39.330.000	2	38.300.000	100	97,38	4	48.253.000	100	97,91	
6	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi				11.422.225.500		756.067.598		10.485.000.000	4.417.852.100		4.374.957.854		98,36		5.131.025.452		79,06	
a	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang aktif dan produktif	kel.	60	248.485.000	19	109.204.485	40	60.000.000	39.760.000	19	39.760.000	47,50	100,00	38	148.964.485	63,33	59,95	
b	Pengadaan jaringan komunikasi	Tersedianya Pusat jaringan komunikasi online se SKPD Kabupaten Temanggung	paket	5	3.928.422.500	1	198.020.663	1	700.000.000	249.771.000	1	249.106.767	100	99,73	2	447.127.430	40,00	11,38	
c	Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data elektronik	Tersedianya alat pengolah data elektronik	paket	2	473.873.000	1	49.222.600	1	2.610.000.000	249.880.000	1	247.131.122	100	98,90	2	296.353.722	100	62,54	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d	Pemeliharaan peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	bulan	60	540.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	85.000.000	12	84.986.200	100	99,98	24	134.986.200	40,00	25,00	
e	Pelayanan Informasi melalui MCAP	Pemerataan akses internet melalui media layanan bergerak, peningkatan kesadaran akan internet sehat, aman dan produktif oleh masyarakat	kegiatan	68	100.000.000	32	59.228.880	36	100.000.000	67.800.000	36	65.117.400	100	96,04	68	124.346.280	100	100	
f	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna	Meningkatnya kapasitas SDM kominfo untuk mendukung kebutuhan informasi dan komunikasi msyrtk	Orang Kegiatan	6	15.000.000	6	15.000.000	6	20.000.000	15.000.000	6	14.998.500	100	99,99	12	29.998.500	200	199,99	
g	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya layanan informasi dan dokumentasi publik kpd masyarakat sesuai amanat UU no 14 Th 2008	Bulan	24	65.000.000	12	49.228.880	12	100.000.000	155.950.000	12	150.137.421	100	96,27	24	199.366.301	100	100	
h	Sosialisasi Internet Sehat dan Aman	Terlaksananya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan internet sehat, aman dan produktif	Orang Kegiatan	6.400	35.000.000	3.600	19.614.440	3.600	50.000.000	48.785.000	3.600	48.785.000	100	100,00	7.200	68.399.440	100	100	
i	Penataan domain dan subdomain SKPD	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain SKPD Kabupaten Temanggung	web	60	695.765.000	23	122.095.200	23	150.000.000	124.800.000	92	122.968.839	100	98,53	115	245.064.039	100	35,22	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
j	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	Terjalinya jaringan akses internet dikantor desa	desa	100	74.880.000	69	-	100	100.000.000	74.880.000	76	73.970.800	76,00	98,79	145	73.970.800	145	98,79	
k	Fasilitasi Pengembangan Media Center	Tercapainya informasi kegiatan pembangunan, kebijakan dan informasi lain kepada masyarakat	Bulan	24	150.000.000	12	84.452.450	12	120.000.000	99.920.000	12	94.543.211	100	94,62	24	178.995.661	100	119,33	
l	Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	Terlaksananya pengamanan persandian dan keamanan informasi	bulan	24	135.800.000	24	-	12	125.000.000	135.800.000	12	134.239.991	100	98,85	36	134.239.991	150	98,85	
m	Pengadaan Infrastruktur Akses Internet Publik	Terwujudnya jaringan akses internet publik dan backbone serat optic	lokasi	20	3.500.000.000	-	-	20	5.000.000.000	2.844.886.100	25	2.833.253.748	100	99,59	25	2.833.253.748	100	80,95	
n	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Terwujudnya Desa Pintar Kabupaten Temanggung dan Optimalisasi Integrasi Data	bulan / kegiatan	20	1.460.000.000	-	-	12	1.250.000.000	225.620.000	12	215.958.855	100	95,72	12	215.958.855	60,00	14,79	
7	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				722.604.300		372.604.300		765.000.000	649.720.000		644.361.380		98,90		1.544.978.780		99,11	
a	Kegiatan Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik daerah	dokumen	2	335.702.300	1	235.702.300	1	120.000.000	100.000.000	1	99.808.000	100	99,81	2	335.510.300	100	99,94	
b	Kegiatan Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM dan INKESRA	dokumen	2	386.902.000	1	136.902.000	1	320.000.000	250.000.000	1	249.979.300	100	99,99	2	386.881.300	100	99,99	
c	Kegiatan Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (PDRB, IHK dan NTP)	dokumen	8	727.733.100	3	528.013.100	3	225.000.000	199.720.000	3	197.802.500	100	99,04	6	725.815.600	75,00	99,74	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
e	Koordinasi Pengintegrasian Data Tingkat Kabupaten	Terwujudnya koordinasi dan validasi bank data pembangunan di Kab. Temanggung	dokumen	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	100.000.000	1	96.771.580	100	96,77	1	96.771.580	100	96,77	
8	Program Perencanaan pembangunan Daerah				5.000.000		1.499.975		3.500.000	3.500.000		2.453.000	100	70,09		3.952.975		79,06	
a	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKjIP dan LPPD	dokumen	49	5.000.000	24	1.499.975	25	3.500.000	3.500.000	25	2.453.000	100	70,09	49	3.952.975	100	79,06	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo

Analisis kinerja Pelayanan Dinkominfo dilakukan dengan melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkominfo sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra.

Indikator Kinerja Daerah Dinkominfo beserta target kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2018 (%)	Status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	-	-	-	45	55	-	-	-	55	55	100	T
2	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	100	T
3	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	%	-	-	-	69,12	100	-	-	-	69,12	100	100	T
4	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	rasio	-	-	-	45	100	-	-	-	45	100	100	T
5	Besaran ketersediaan data statistik	dok	-	-	-	8	9	-	-	-	8	9	100	T

Capaian kinerja daerah sampai dengan tahun 2018 telah tercapai 100%. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- 1) Penerapan strategi pembinaan dan pemberdayaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang difokuskan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bulu terbentuk 19 KIM dan Kecamatan Jumo 13 KIM, serta target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2018 melalui kegiatan desiminasi dan pendistribusian informasi sebagai berikut:
 - a) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, seperti majalah, radio, dan TV (tercapai).
 - b) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (internet) (tercapai).
 - c) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat (tercapai).
 - d) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya (tercapai).

- e) diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho (tercapai).
- 2) Kesadaran akan keamanan jaringan dan kemudahan yang diperoleh dari integrasi jaringan membuat pelaksanaan pemasangan jaringan lebih mudah dan terarah.
- 3) Animo besar masyarakat akan akses internet di ruang publik diwujudkan dengan semakin banyaknya ruang publik yang disediakan pemerintah daerah.
- 4) Diserahkannya kewenangan statistik sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- 5) Kebutuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun data pokok pembangunan berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung sampai dengan kondisi akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Indikator Makro Daerah

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (human Development report 1990). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Metodologi perhitungan IPM terdiri dari komponen sebagai berikut:

1) Kependudukan

Data kependudukan yang berhubungan dengan perhitungan APM yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio ketergantungan penduduk.

2) Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami Keluhan kesehatan dan menderita sakit yang secara langsung berpengaruh dengan aktifitas sehari-hari, selain itu juga data tentang jumlah kepemilikan

jaminan. Aspek kesehatan dalam perhitungan IPM tercermin dari Angka Harapan Hidup

3) *Pendidikan*

Aspek pendidikan dapat tercermin dari data persentase menurut partisipasi sekolah, partisipasi sekolah dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka partisipasi Murni (APM)

4) *Ekonomi*

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang dijadikan parameter untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam perhitungan IPM.

5) *Kemiskinan*

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter yang berpengaruh dalam perhitungan IPM.

6) *Ketenagakerjaan*

Aspek ketenagakerjaan menjadi penting dalam perhitungan IPM dikarenakan berkaitan langsung dengan kualitas manusia dalam bidang pekerjaan yang berujung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan manusia. Indikator IPM dibidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Persentase Penduduk menurut lapangan Usaha.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebesar 68,34 masuk kedalam kategori sedang.

Tabel 2.3 Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

TAHUN	IPM
2014	65,97
2015	67,07
2016	67,60
2017	68,34
2018	68,89

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami tren kenaikan, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Temanggung terus meningkat, aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian ASPM yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan secara umum meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih dalam kategori sedang.

2.2.1.2 Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai tingkat perubahan harga dari barang dan jasa pada satu waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakatpun akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Perkembangan laju inflasi dari tahun 2014 s/d tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Perkembangan Laju Inflasi Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2014	7,81	8,22	8,36
2015	2,74	2,73	3,35
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,71	3,61
2018	2,89	2,82	3,13

Sumber : BPS kabupaten Temanggung

Jika diamati angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Dalam satu dasawarsa terakhir, selaras yang terjadi juga di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia, inflasi tertinggi di Kabupaten Temanggung juga terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,81 persen. Salah satu pemicu inflasi tertinggi ini adalah pengaruh suhu politik yang agak tinggi yaitu efek pemilihan presiden pada tahun tersebut.

Adapun inflasi terendah Kabupaten Temanggung, selama 5 tahun terakhir, adalah sebesar 2,42 persen terjadi pada tahun 2016. Pada 2018 inflasi masih bisa dikatakan cukup terjaga dengan tingkat inflasi yang tidak setinggi inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 3,12 persen, walaupun masih diatas inflasi Jawa Tengah tetapi masih rendah dibandingkan inflasi secara nasional.

2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.5 PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2014-2018

Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2014	14.592.453,38	11,49	11.867.679,59	5,03
2015	16.139.711,67	10,60	12.489.394,54	5,24
2016	17.564.473,01	8,83	13.110.745,64	4,98
2017	18.833.169,01	7,22	13.724.464,81	4,68
2018	20.207.517,86	7,44	14.452.019,21	4,8

Sumber : BPS kabupaten Temanggung

Pada tahun 2018 besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Temanggung secara agregat mencapai Rp. 20.207.517,86. Angka sebesar itu menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,44 persen, pertumbuhan PDRB adhb tersebut sebenarnya belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2018 sebesar 4,80 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 4,68 persen.

Dari tabel diatas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut harga berlaku terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 11,49 persen, sedangkan pertumbuhan terendah 7,22 persen terjadi pada tahun 2017. Berbeda dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,24 persen dan pertumbuhan terendah terjadi di tahun yang sama 2017 sebesar 4,68 persen.

Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Tahun	Pertumbuhan ekonomi		
	Temanggung	Jateng	Nasional
2014	5,03	5,27	5,01
2015	5,24	5,47	4,88
2016	4,98	5,27	5,03
2017	4,68	5,27	5,07
2018	4,80	5,32	5,17

Sumber : BPS kabupaten Temanggung

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,32 persen dan lebih rendah pula bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Nasional yang tumbuh sebesar 5,17 persen.

2.2.1.4 Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah jumlah rata-rata besaran pendapatan berupa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Meskipun belum secara pasti mencerminkan pemerataan,

Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro.

Tabel 2.7 Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2014-2018

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	NILAI (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2014	19.748.487,14	10,43
2015	21.641.442,46	9,59
2016	23.341.213,21	7,85
2017	24.810.094,94	6,29
2018	26,2 Juta	5,6

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan, secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik, namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah salah satu jenis pengangguran dimana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2014-2018

TAHUN	TPT (%)
2014	3,19
2015	1,5
2016	NA
2017	2,97
2018	3,24

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.8 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 tercatat sebesar 3,19 persen, dan menurun di tahun 2015 sebesar 1,5 persen dimana merupakan pada tahun tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung paling kecil selama kurun waktu 5 Tahun, pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan lagi menjadi 3,24 persen di tahun 2018. Artinya diantara 100 penduduk temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 4 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran, pengangguran terselubung dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta pekerja dimana seseorang belum bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

2.2.2 Bidang Kominfo

2.2.2.1 Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) *Domain Kebijakan Internal SPBE;*
- 2) *Domain Tata Kelola SPBE;*
- 3) *Domain Layanan SPBE.*

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangatbaik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung, 2018

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10 Nilai Indeks SPBE Tahun 2018 hasil penilaian dari Kemenpan RB

No	Uraian	Nilai indeks	Nilai	Predikat
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE	1,84	Cukup
		Domain Kebijakan SPBE	1,65	
		Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,43	
		Kebijakan Layanan SPBE	1,80	
		Domain Tata Kelola	1,29	
		Kelembagaan	1,00	
		Strategi & Perencanaan	1,50	
		TIK	1,33	
		Domain Layanan SPBE	2,18	
		Administrasi Pemerintahan	2,29	
		Pelayanan Publik	2,00	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Dari Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE dan mendapatkan nilai kematangan 1,84 dengan predikat CUKUP dengan rincian:

- 1) *Domain kebijakan internal SPBE 1,65*
- 2) *Domain tata kelola 1,29*
- 3) *Domain layanan SPBE 2,18.*

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

2.2.2.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/ SAQ (Self Assesment Questionnaire)

Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
- Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
- Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
- Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
- Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif;

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai terbaik untuk dilanjutkan dengan visitasi verifikasi.

2) Visitasi Verifikasi

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

3) Uji Publik

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi dihadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

4) Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian website;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik.

Tabel 2.11 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	52,9	63,23	70,09	70,8	77,9
2	Kategori	Cukup Informatif				

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan

mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Tabel 2.12 Nilai Monev Website Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2018

NO.	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI MONEV WEBSITE TAHAP 1	TOTAL NILAI MONEV WEBSITE TAHAP 2
1	KOTA SEMARANG	55	100
2	KAB. WONOGIRI	14	90
3	KOTA MAGELANG	90	90
4	KAB. PURBALINGGA	33	89
5	KOTA PEKALONGAN	86	88
6	KOTA SURAKARTA	54	85
7	KAB. KARANGANYAR	37	73
8	KAB. BATANG	31	64
9	KAB. TEMANGGUNG	30	61
10	KAB. KLATEN	54	58
11	KAB. MAGELANG	29	58
12	KAB. PEMALANG	53	54
13	KAB. REMBANG	53	53
14	KAB. GROBOGAN	28	51
15	KAB. BANJARNEGARA	21	58
16	KAB. PEKALONGAN	33	46
17	KAB. KEBUMEN	41	41
18	KAB. KENDAL	16	40
19	KAB. KUDUS	40	40
20	KAB. PATI	23	40
21	KAB. BREBES	34	35
22	KAB. BLORA	30	31
23	KAB. CILACAP	30	30
24	KAB. JEPARA	18	28
25	KAB. BANYUMAS	27	26
26	KAB. SRAGEN	23	26
27	KAB. SEMARANG	13	24
28	KAB. BOYOLALI	14	21
29	KAB. WONOSOBO	14	20
30	KOTA SALATIGA	20	20
31	KAB. PURWOREJO	16	19
32	KAB. DEMAK	17	17
33	KAB. SUKOHARJO	15	17
34	KAB. TEGAL	17	17
35	KOTA TEGAL	14	15

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Tabel 2.13 Instrumen SAQ Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2018

 KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK						
Petunjuk Pengisian : Penyempitan informasi hendak mengetahui, mengevaluasi dan menilai terpenuhinya informasi publik wajib tersedia dan diumumkan oleh Badan Publik. Jawaban atas pernyataan-pernyataan adalah gambaran faktual/terjadi atau tidak, yang harus diisi dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini:						
1. KETERSEDIAAN : Beri tanda V apabila YA, atau tanda X bila TIDAK						
2. MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK:						
a Website: Berikan permanent Link/URL, (Uniform Resource Locator) website resmi yang digunakan Badan Publik						
b Media Sosial: Tuliskan nama akun salah satu dari facebook atau twitter atau instagram						
3. Terhadap alamat Link/URL dan nama akun mediasos yang tidak dapat dibuka/dilekses, tidak dilakukan penilaian dan pencatatan.						
4. Badan Publik dapat menambah kolom dan halaman bila mana diperlukan.						
5. Gunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi sebagai petunjuk pengisian jawaban						
No.	PERNYATAAN	KETERSEDIAAN		MEKANISME PENYAMPAIN INFORMASI PUBLIK		BOBOT NILAI
		YA	TIDAK	Website	Media Sosial	
1	Perki No 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) hal informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala menetapkan jenis-jenis informasi profil Badan Publik, informasi profil apakah yang disampaikan Badan Publik kepada masyarakat, dan dengan cara apa disampaikan? Apakah diumumkan pula hasil LHKPN bagi pejabat yang wajib dan hasil LHKABN					6
a	Mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no telepon dan alamat email/website	V		http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35406/alamat-alamat-muspidia.html		
b	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik	V		http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35410/alamat-alamat-dinas-daerah-dan-pupoksi.html		
c	Mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik sampai dengan tiga tingkat ke bawah	V		http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/3336/kepan-jabatan-organisasi-kepada.html		
d	Mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah yang mencakup seluruh-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima	V		http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/35406/alamat-alamat-muspidia.html		
e	Mengumumkan LHKPN/LHKABN Pimpinan Badan Publik sampai dengan tiga tingkat ke bawah, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKABN kepada KPK.	V		http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/f11654/lhkn.html		
f	Mengumumkan LHKPN/LHKABN Pimpinan SKPD, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKABN kepada KPK.	V		http://ppid.temanggungkab.go.id		
g	Mengumumkan visi dan misi badan publik	V		http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/3116/kepan-kepan-kepada.html		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

2.2.2.3 Persentase PPID badan publik yang aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan informasi, meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
- 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- 7) Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- 8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Yang dimaksud PPID aktif dalam hal ini adalah PPID Pembantu Badan Publik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh dengan indikator penilaian sebagai berikut:

- Mengumumkan Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Rumus memperoleh angka persentase PPID badan publik yang aktif yaitu Jumlah PPID aktif dibagi total badan publik dikali 100 %. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14 Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	n.a	n.a	n.a	5	26
2	Jumlah PPID badan publik	388	388	388	388	388
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	n.a	n.a	n.a	2%	6,7%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.14 dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017, namun demikian masih terbilang kecil. Hal ini dikarenakan masih belum kuatnya kesadaran ditingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID.

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 2.15 memperlihatkan keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017 dan 2018.

Tabel 2.15 Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Nama Badan Publik	2017	2018
1	Sekretaris DPRD	-	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif	Aktif
3	Dinas Pendidikan	Aktif	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi	-	Aktif

No	Nama Badan Publik	2017	2018
	Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah		
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	-	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	-	Aktif
11	Dinas Sosial	-	-
12	Dinas Perhubungan	Aktif	Aktif
13	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	Aktif
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aktif	Aktif
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Aktif
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	Aktif
19	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	Aktif
20	Inspektorat	-	Aktif
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	Aktif
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Aktif	Aktif
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	-	Aktif
24	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	-	Aktif
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Aktif
26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	-	Aktif
27	Kecamatan Temanggung	-	Aktif
28	Kecamatan Tembarak	-	Aktif
29	Kecamatan Pringsurat	-	-
30	Kecamatan Kaloran	-	Aktif
31	Kecamatan Kranggan	-	-
32	Kecamatan Parakan	-	-
33	Kecamatan Kedu	-	-
34	Kecamatan Bulu	-	-

No	Nama Badan Publik	2017	2018
35	Kecamatan Kandangan	-	-
36	Kecamatan Candiroto	-	Aktif
37	Kecamatan Jumo	-	-
38	Kecamatan Wonobojo	-	Aktif
39	Kecamatan Ngadirejo	-	Aktif
40	Kecamatan Bejen	-	-
41	Kecamatan Tretep	-	-
42	Kecamatan Kledung	-	Aktif
43	Kecamatan Selopampang	-	-
44	Kecamatan Tlogomulyo	-	Aktif
45	Kecamatan Gemawang	-	-
46	Kecamatan Bansari	-	-
	Jumlah	6	32

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

2.2.2.4 Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dasar penilaian keaktifan KIM ini adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informasi yaitu Permen Kominfo No. 22/P/M.KOMINFO/12/2010 yang mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk KIM minimal sejumlah kecamatan yang ada. dari SPM inilah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung berinisiatif untuk mengukur tingkat keaktifan KIM yang telah terbentuk. Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau dijabarkan sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya; menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa
- Untuk memperoleh angka persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif dapat menggunakan rumus jumlah KIM yang aktif/jumlah KIM yang terbentuk x 100%.

Realisasi persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	n.a	n.a	1	2
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	n.a	n.a	n.a	19	42
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	n.a	n.a	5%	5%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.16 dapat dilihat bahwa persentase KIM yang aktif pada tahun 2017 masih relative kecil, oleh sebab itu mulai tahun 2017, Dinas Kominfo melakukan strategi untuk menggandeng kader-kader KPMD/LKMD (Kader/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk membentuk KIM, strategi ini diambil karena dirasa ada kesamaan visi dan tujuan antara KPMD/LPMD dengan KIM yaitu pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembentukan dimulai dari Kecamatan Bulu, dengan jumlah 19 KIM yang berhasil terbentuk, dilanjutkan dengan Kecamatan Jumo dengan jumlah 13 KIM yang terbentuk. Rencana kedepan dilanjutkan dengan Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kranggan, serta menyeluruh di seluruh 20 kecamatan.

Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan keaktifan KIM adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, sarasehan, diskusi, workshop dan bimtek, dengan materi yang bersifat teknis maupun peningkatan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap literasi informasi. Adapun KIM yang sudah dibentuk disajikan pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.17 KIM Kecamatan Bulu Tahun 2017

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	NO SK
1	Kayana	Danupayan	141/8 tahun 2018
2	Desa	Tegallurung	141/002/iii/2018
3	Almond	Mondoretno	23/xi/2017
4	Sari makmur	Campursari	141.2/02 tahun 2018
5	Sebid	Putat	006/kim/2018
6	Bansari	Bansari	01/i/2018
7	Pandemulyo	Pandemulyo	220/5/2018
8	Ngudi sari	Malangsari	19/iii/2018

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	NO SK
9	Pengilon	Pengilon	3 tahun 2018
10	Loh jinawi	Gandurejo	520/002/iii/2018
11	Prasasti	Gondosuli	061/4 tahun 2018
12	Cinta ngimbrang	Ngimbrang	27/007/iii/2018
13	Madani	Pagergunung	01/iii/2018
14	KIM tingkat desa	Pakurejo	141/19/2018
15	De pasthi	Pasuruhan	141/10/iii/2018
16	KIM tingkat desa	Tegalrejo	141/003/iii/2018
17	Tirto meteor	Wonotirto	141/07/tahun 2018
18	Wonosari	Wonosari	04/iii/2018
19	Bulu Jaya	Bulu	141.03 tahun 2018

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Tabel 2.18 KIM Kecamatan Jumo Tahun 2018

NO.	NAMA	ALAMAT	NO SK
1	Maju Makmur	Karangtejo	141/19/2018
2	Bersama	Jombor	141/28/xi/2018
3	Jaya Utama	Jamusan	46/xi/2018
4	Tentrem	Sukomarto	22/xi/2018
5	Legowo	Giyono	411.2/42 tahun 2018
6	Podo Maju	Morobongo	23 tahun 2018
7	Taruna Bhakti	Barang	5/xi/2018
8	Manggala	Gunung Gempol	555/25/xi/tahun 2018
9	Berlian	Padureso	18 tahun 2018
10	Lancar Jaya	Kertosari	141.1/14/xi/2018
11	Damai Sejahtera	Ketitang	25
12	Sido Dadi	Gedongsari	141/25/xi/2018
13	Adipati Sindurejo	Jumo	0031/ds/xi/2018

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

2.2.2.5 Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

LP (Lembaga Penyiaran) terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Kepatuhan Lembaga Penyiaran terhadap norma siaran adalah pelaksanaan regulasi tentang penyiaran dan norma siaran oleh lembaga penyiaran, baik publik, swasta maupun komunitas di Kabupaten Temanggung. Regulasi penyiaran yang dimaksud yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Program Penyiaran (P3) dan SPS (Standar Program Siaran), serta aturan terkait penyiaran yang ditetapkan oleh lembaga penyiaran, baik Kominfo, Balai Monitoring (Balmon) dan Komisi Penyiaran. Norma Siaran mengacu pada:

- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
- Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Persentase kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran diukur dengan jumlah aduan/jumlah pelanggaran yang dapat ditangani dan kemudian ditindaklanjuti. Adapun rumus yang digunakan adalah: jumlah aduan tertangani dibagi jumlah aduan dikali 100%. Apabila dalam tahun tertentu tidak ada aduan, maka capaiannya dianggap 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah aduan yang ditangani	3	2	3	Nihil	Nihil
2	Jumlah aduan	2	3	Nihil	Nihil	Nihil
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Dari Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%, artinya setiap ada pengaduan selalu dapat ditindak lanjuti.

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 LPP di Kabupaten Temanggung

NO	NAMA LPP	ALAMAT	FREK
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz
2	Radio Angkasa 7	JL. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz
7	Radio Shantika	Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/03000

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinas Kominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Mulai tahun 2018 kelompok pemantau ini beranggotakan unsur birokrasi, GP Ansor, KNPI dan Karang Taruna.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat

berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.

2.2.2.6 Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komiinfo, adapun jumlah area publik pada tahun 2018 sejumlah 25 lokasi.

Pada awal tahun 2019 terjadi penambahan area publik di beberapa tempat sejumlah 35 lokasi yang telah ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sehingga pada tahun 2019 ini tercatat ada 60 area publik dan menjadi urusan Dinkominfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet.

Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinkominfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai tahun 2016 s.d tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Lokasi area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	-	-	6	7	25
2	Jumlah area publik	25	25	25	25	25
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	0	0	24	28	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Tabel 2.22 Lokasi area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet s.d tahun 2018

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pemasangan	Panjang Tarikan FO (meter)
1	Halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	2016	ikut tarikan Perpusda
2	Areal pusat Komunitas kreatif	2016	ikut tarikan Pusat Komunitas Kreatif
3	Alun-Alun	2016	Radio PTP ke Pendopo Pengayoman
4	Taman Pengayoman	2016	250
5	Area Pendopo Jenar	2016	250

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pemasangan	Panjang Tarikan FO (meter)
6	Area Setda	2016	200
7	Pikatan Waterpark	2017	Radio PTP ke Disdukcapil
8	Taman Kali Progo	2018	Radio PTP ke Dishub
9	Pujasera	2018	100
10	Taman kartini		ikut tarikan Perpusda
11	Tirto Asri Water splash	2018	ikut tarikan Perpusda
12	Hutan Kota Gumuk Lintang	2018	250
13	City Walk (tugu jam)	2018	150
14	Pasar Kliwon	2018	300
15	Plaza (Pasar Temanggung Permai)	2018	250
16	Area Kuliner Samping DPRD	2018	ikut tarikan DPRD Temanggung
17	Majid Agung Darussalam	2018	300
18	Citywalk Depan Diskominfo	2018	ikut tarikan Diskominfo
19	Citywalk Depan Kecamatan Temanggung	2018	ikut tarikan Kec Temanggung
20	Area RSUD Djoyonegoro	2018	ikut tarikan Badan Pengelola RSUD Djoyonegoro
21	Area Lapangan TV Temanggung	2018	ikut tarikan TV Temanggung
22	Area Pasar Burung Kerkop	2018	Radio PTP ke Dinas Pertanian
23	Terminal Temanggung	2018	150
24	GOR Bambu Runcing	2018	200
25	Komplek Stadion	2018	400

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

2.2.2.7 Persentase Ketersediaan Jaringan Internet

Jaringan Internet sebagai sebuah sistem adalah Sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti remote login, transfer file, surat elektronik, World Wide Web dan newsgroup. Ketersediaan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar komunikasi data antar lingkungan kerja yang saling terhubung.

Jaringan internet dilewatkan melalui media kabel (wired) dan nirkabel (wireless) dengan topologi tertentu. System ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE. Angka presentasi ketersediaan jaringan internet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%. Adapun capaian hingga tahun 2019 Triwulan 2 disajikan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab. Temanggung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung	n.a	n.a	88	146	235
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	n.a	n.a	395	395	395
3	Ketersediaan jaringan intranet (%)	n.a	n.a	22,28	36,96	59,49

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2016 s.d 2019 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Pada Tabel 2.24 diperlihatkan jumlah ketersediaan jaringan internet secara rinci.

Tabel 2.24 Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	n.a	n.a	24	25	27
2	Jumlah Kecamatan	n.a	n.a	16	16	20
3	Jumlah Kelurahan	n.a	n.a	2	7	23
4	Jumlah Desa	n.a	n.a	31	73	126
5	Jumlah UPT/eks UPT	n.a	n.a	15	25	39
JUMLAH				88	146	235

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

2.2.2.8 Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100 %.

Realisasi persentase sistem informasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	n.a	n.a	5	19	31
2	Jumlah sitem informasi	n.a	n.a	377	398	456
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	n.a	n.a	1 %	5 %	7 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.25 dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2014-2019 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Data sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Sistem Informasi yang Terintegrasi tahun 2018

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
1	Simbada	1	e-movev
2	sibangda	1	mapatda
3	Lpse	1	sirup
4	Jdih	1	e-dokum (dokumen hukum)

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
5	p2kp	1	simpeg
6	Portal VPN dan SSO	1	sistem informasi lain
7	dindikpora	1	sistem informasi kemendikbud
8	Sipd	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	dindukcapil	1	layanan kependudukan online
10	perizinan-dpmptsp	1	data kependudukan
11	monitorabsen	1	Simpeg, e-tp, e-kinerja
12	Gabungan Data (Gandem)	1	bank data, sipd, data
13	e-kinerja	1	simpeg, e-tp, monitor absen
14	simpeg	1	e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
15	Bankdata	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
16	Gis Tata Ruang	1	GIS Terintegrasi
17	e-TPP	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
18	Portal Web BKPSDM	1	simpeg, e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
19	e-retribusi	1	bank BPD Jateng
20	inbox.bkd	1	simpeg
21	e-peluk ASN	1	simpeg
22	mapatda	1	sibangda, sig-mapatda
23	sig-mapatda-bppkad	1	mapatda
24	Data	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
25	layanan kependudukan online	1	data kependudukan
26	e-planning	1	e-budgeting, e-monev
27	e-budgeting	1	e-planning, e-monev
28	sirup	1	lpse
29	e-monev	1	e-budgeting, e-planning
30	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	jdih
31	GIS Terintegrasi	1	gis tataruang
	Jumlah Total	31	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

2.2.2.9 Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya.

Angka persentase sistem informasi yang berfungsi optimal diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikali 100%.

Realisasi persentase sistem informasi yang berfungsi optimal di Kabupaten Temanggung tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27 Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	n.a	n.a	20	29	46
2	Jumlah sistem informasi	n.a	n.a	377	398	456
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	n.a	n.a	5 %	7 %	38 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.27 di dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2014-2019 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Adapun data sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Akhir Tahun 2018

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TAHUN 2018	
		OPTIMAL	TIDAK OPTIMAL
1	temanggungkab.go.id	1	
2	Simbada	1	
3	Sibangda	1	
4	Lpse	1	
5	Jdih	1	
6	p2kp	1	
7	Mail	1	
8	Sms	1	
9	Dindikpora	1	
10	Sipd	1	
11	Puskomkref	1	
12	simwasda.inspektorat	1	
13	Ppid	1	
14	Dindukcapil	1	
15	Cellplan	1	
16	perizinan-dpmptsp	1	
17	Rsud	1	
18	Monitorabsen	1	
19	Sipt	1	
20	Simpus	24	
21	web puskesmas	26	

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TAHUN 2018	
		OPTIMAL	TIDAK OPTIMAL
22	Gandem	1	
23	Simdkt	1	
24	e-kinerja	1	
25	Simpeg	1	
26	Bankdata	1	
27	Gis Tata Ruang	1	
28	e-TPP	1	
29	Portal Sistem Informasi	1	
30	Bkpsdm	1	
31	Sivespa	1	
32	e-retribusi	1	
33	Simelon	1	
34	inbox.bkd	1	
35	e-peluk ASN	1	
36	Mapatda	1	
37	sig-mapatda-bppkad	1	
38	Data	1	
39	layanan kependudukan online	1	
40	e-planning	1	
41	e-budgeting	1	
42	Sirup	1	
43	e-risalah	1	
44	e-monev	1	
45	Sigender	1	
46	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	
47	Rupabumi	1	
48	GIS Terintegrasi	1	
49	Portal VPN dan SSO	1	
50	Mediacenter	1	
51	Musrenbang	1	
52	website kecamatan	20	
53	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	20	269
54	Website OPD	18	4
55	paten-kecamatan	20	
56	Simpeda		1
57	Surya		1
58	Kantaya		1
59	Simonit		1
60	tito.bappeda		1
61	Dekranasda		1
	Jumlah	175	281
	Jumlah Total	456	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

2.2.3 Bidang Statistik

2.2.3.1 Cakupan ketersediaan data makro daerah

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain sebagainya. Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik Kabupaten Temanggung, Bank Data Pembangunan dan lain sebagainya.

Cakupan ketersediaan data makro daerah diperoleh dengan cara menghitung jumlah data makro yang tersedia dibagi kebutuhan data makro yang menjadi kebutuhan daerah di kali seratus persen. Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 7 (tujuh) yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Realisasi cakupan ketersediaan data makro daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Data makro yang tersedia	7	7	5	6	6
2	Kebutuhan data makro	7	7	7	7	7
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	100%	100%	71,4%	85,7%	87%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.29 dapat dilihat bahwa cakupan ketersediaan data makro daerah belum dapat tercapai 100%, hal ini karena pada tahun 2014-2019 penyusunan IPM dan INKESRA secara bergantian tiap dua tahun sekali. Data dukung terkait indikator cakupan ketersediaan data makro daerah ditampilkan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No	Jenis Data	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Laju Inflasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	tersedia	tersedia	tidak tersedia	tersedia	tersedia
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Indeks Gini	tersedia	tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
	TOTAL	7	7	5	6	6

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

2.2.4 Bidang Persandian

2.2.4.1 Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih yaitu sandiman.

Dalam pembangunan suatu aplikasi berbasis web, perlu dilakukan pengujian berdasarkan tingkat kualitas dan keamanannya. Kualitas sebuah aplikasi ditentukan oleh dua faktor yaitu bugs (aplikasi tidak bias memenuhi sebagian spesifikasi kebutuhan yang sudah disepakati dan security vulnerability. Aplikasi memiliki fungsi yang tidak diinginkan).

Aplikasi berbasis web memiliki banyak potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Potensi keamanan dari aplikasi dapat diketahui dengan melaksanakan IT Security Assessment, yaitu pengujian terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan pada suatu sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya celah keamanan dalam aplikasi tersebut.

Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah sistem elektronik yang ada dikali seratus persen. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

Realisasi tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	n.a	n.a	n.a	5
2	Jumlah sistem elektronik	n.a	n.a	n.a	n.a	60
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	n.a	n.a	n.a	n.a	8,3%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2018

Berdasarkan Tabel 2.31 diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi pada tahun 2018 masih sangat kecil, karena kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan Security Assessment. Pada tahun 2018 dapat dikerjasamakan sejumlah 5 (lima) sistem informasi, namun mulai tahun 2019 dibatasi hanya 3 (tiga) sistem informasi (ketentuan BSSN). Target yang nantinya ditetapkan tahun 2019-2023 sebesar 1% per tahun.

Data dukung terkait tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi disajikan pada Tabel 2.32 dan Tabel 2.33.

Tabel 2.32 Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT
1	bag humas	Website Pemkab	temanggungkab.go.id.temanggunkab.go.id
2	bppkad	Simbada	Simbada.temanggungkab.go.id
3	bag pembangunan	sibangda	sibangda.temanggungkab.go.id
4	bag pembangunan	LPSE	lpse.temanggungkab.go.id
5	bag Hukum	JDIH	jdih.temanggungkab.go.id
6	BKPSDM	P2KP	p2kp.temanggungkab.go.id
7	Dinas Kominfo	Mail	mail.temanggungkab.go.id
8	Dinkes	Simpus	simpus.temanggungkab.go.id
9	bag humas	Sms	sms.temanggungkab.go.id
10	dindikpora	Dindikpora	dindikpora.temanggungkab.go.id
11	off	simonit	simonit.temanggungkab.go.id
12	bappeda	Sipd	sipd.temanggungkab.go.id
13	bappeda	tito.bappeda	tito.bappeda.temanggungkab.go.id
14	off	dekranasda	dekranasda.temanggungkab.go.id
15	Dinas Kominfo	puskomkref	puskomkref.temanggungkab.go.id
16	inspektorat	simwasda.inspektorat	simwasda.inspektorat.temanggunkab.go.id
17	Dinas Kominfo	Ppid	ppid.temanggungkab.go.id
18	Dindukcapil	dindukcapil	dindukcapil.temanggungkab.go.id
19	DPMPTSP	cellplan	cellplan.temanggungkab.go.id
20	DPMPTSP	perizinan-dpmptsp	perizinan-dpmptsp.temanggungkab.go.id
21	BKPSDM	monitorabsen	monitorabsen.temanggungkab.go.id
22	Dinkes	Sipt	sipt.temanggungkab.go.id
23	Dinas Kominfo	website kecamatan	website kecamatan.temanggungkab.go.id
24	dinsos	web dinsos	web dinsos.temanggungkab.go.id
25	Dinas Kominfo	gandem	gandem.temanggungkab.go.id
26	bappeda	simdkt	simdkt.temanggungkab.go.id
27	dinpermades	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan).temanggungkab.go.id
28	bag ortala	e-kinerja	e-kinerja.temanggungkab.go.id
29	BKPSDM	simpeg	simpeg.temanggungkab.go.id
30	Dinas Kominfo	Bankdata	Bankdata.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT
31	DPUPKP	Gis Tata Ruang	Gis Tata Ruang.temanggungkab.go.id
32	bag ortala	e-TPP	e-TPP.temanggungkab.go.id
33	Dinas Kominfo	Website OPD	Website OPD.temanggungkab.go.id
34	Dinas Kominfo	Portal Sistem Informasi	Portal Sistem Informasisifo.temanggungkab.go.id
35	BKPSDM	bkpsdm	bkpsdm.temanggungkab.go.id
36	satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar.temanggungkab.go.id
37	Dinperindagkopukm	e-retribusi	e-retribusi.temanggungkab.go.id
38	Bag perekonomian	simelon3kg-setda	simelon3kg-setda.temanggungkab.go.id
39	BKPSDM	inbox.bkd	inbox.bkd.temanggungkab.go.id
40	BKPSDM	e-peluk ASN	e-peluk ASN.temanggungkab.go.id
41	bppkad	mapatda	mapatda.temanggungkab.go.id
42	bppkad	sig-mapatda-bppkad	sig-mapatda-bppkadbppkad-online.temanggungkab.go.id
43	Dinas Kominfo	Data	data.temanggungkab.go.id
44	Dindukcakil	layanan kependudukan online	layanan kependudukan onlinedindukcakil.temanggungkab.go.id/pelayanan
45	bappeda	e-planning	e-planning.temanggungkab.go.id
46	bppkad	e-budgeting	e-budgeting.temanggungkab.go.id
47	bag. Pembangunan (pusat)	Sirup	sirup.temanggungkab.go.id
48	BPPKAD	SIAKD (akrual)	dekstop base
49	dinpermades	siskeudes	dekstop base
50	SETWAN	e-risalah	e-risalah.temanggungkab.go.id
51	bappeda	e-monev	e-monev.temanggungkab.go.id
52	DPPKBPPPA	sigender	sigender.temanggungkab.go.id
53	Bag. Hukum	e-dokum	e-dokum.temanggungkab.go.id
54	Bag. Pemerintahan	rupabumi	rupabumi.temanggungkab.go.id
55	Dinkes	web puskesmas	web puskesmas.temanggungkab.go.id
56	Dinas Kominfo	GIS Terintegrasi	GIS Terintegrasi.temanggungkab.go.id
57	Dinas Kominfo	Portal VPN dan SSO	Portal VPN dan SSO.temanggungkab.go.id
58	Dinas Kominfo	mediacenter	mediacenter.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT
59	bappeda	musrenbang	musrenbang.temanggungkab.go.id
60	DPMPTSP	paten-kecamatan	paten-kecamatan.temanggungkab.go.id

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

Tabel 2.33 Hasil TT Security Assesment oleh BSSN di Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT	TINGKAT RESIKO
1	Dinkominfo	Gandem	https://gandem.temanggungkab.go.id	Tinggi
2	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	Sedang
3	BKPSDM	Simpeg	http://www.bkpsdm.temanggungkab.go.id	Tinggi
4	Dinas Kesehatan	Simpus	http://ujisimpus.temanggungkab.go.id	Sedang
5	Bappeda	Simdkt	http://simdkt.temanggungkab.go.id	Tinggi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2018

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Keberhasilan Pembangunan Daerah berkorelasi dengan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini akan mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik. Data menunjukkan sampai dengan tahun 2018, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) serta kualitas pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dengan mensinergikan pelaksanaan program perangkat daerah dengan penelitian dan pengembangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renja berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

1) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi

masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informatika berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komukasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

2) Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Komunikasi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.
- 3) Penyediaan data statistik daerah melalui single data
- Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.
- Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.
- Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.
- 4) Keamanan Informasi
- Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.
- Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.
- Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Dinkominfo.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.34 berikut ini.

Tabel 2.34
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.792.077.849	I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.792.077.849	
	Belanja Pegawai					1.792.077.849		Belanja Pegawai					1.792.077.849	
	Belanja Pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	Bulan	1.792.077.849		Belanja Pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	Bulan	1.792.077.849	
	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja		Kab. Temanggung			0		Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja		Kab. Temanggung			0	
II	BELANJA LANGSUNG					12.106.000.000	II	BELANJA LANGSUNG					7.106.000.000	
A	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif		15	%	2.276.150.000	A	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif		15	%	2.276.150.000	
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif		40	%				Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif		40	%		
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran		100	%				Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran		100	%		
1	Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase PPID badan publik yang aktif	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	30.000.000	1	Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase PPID badan publik yang aktif	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya informasi dan program kerja pemerintah kepada masyarakat melalui kesenian rakyat	Kab. Temanggung	4	Kegiatan	65.000.000	2	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya informasi dan program kerja pemerintah kepada masyarakat melalui kesenian rakyat	Kab. Temanggung	4	Kegiatan	65.000.000	
3	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Penambahan dan pengembangan perangkat media center kominfo untuk mendukung fungsi diseminasi informasi kepada masyarakat	Kab. Temanggung	1	Paket	35.000.000	3	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Penambahan dan pengembangan perangkat media center kominfo untuk mendukung fungsi diseminasi informasi kepada masyarakat	Kab. Temanggung	1	Paket	35.000.000	
4	Pemeliharaan Alat Studio	Terpeliharanya perangkat media center kominfo	Kab. Temanggung	1	Paket	14.000.000	4	Pemeliharaan Alat Studio	Terpeliharanya perangkat media center kominfo	Kab. Temanggung	1	Paket	14.000.000	
5	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	Terlaksananya pembinaan kepada lembaga penyiaran; Peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	Kab. Temanggung	3	Kegiatan	30.000.000	5	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	Terlaksananya pembinaan kepada lembaga penyiaran; Peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	Kab. Temanggung	3	Kegiatan	30.000.000	
6	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	Peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat, khususnya UKM; Peningkatan taraf perekonomian UKM dan masyarakat	Kab. Temanggung	12	Bulan	175.000.000	6	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	Peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat, khususnya UKM; Peningkatan taraf perekonomian UKM dan masyarakat	Kab. Temanggung	12	Bulan	175.000.000	
7	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	Peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat	Kab. Temanggung	128/2200	Kegiatan	41.650.000	7	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	Peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat	Kab. Temanggung	128/2200	Kegiatan	41.650.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
8	Fasilitasi Internet Sehat dan Aman	Peningkatan pemahaman masyarakat akan internet sehat dan aman	Kab. Temanggung	4/350	Kegiatan	18.000.000	8	Fasilitasi Internet Sehat dan Aman	Peningkatan pemahaman masyarakat akan internet sehat dan aman	Kab. Temanggung	4/350	Kegiatan	18.000.000	
9	Pelayanan Informasi Publik	Terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	Kab. Temanggung	12	Bulan	100.000.000	9	Pelayanan Informasi Publik	Terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	Kab. Temanggung	12	Bulan	100.000.000	
10	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	Peningkatan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) / Relawan TIK dalam diseminasi informasi kepada masyarakat	Kab. Temanggung	77	KIM/RTIK	150.000.000	10	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	Peningkatan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) / Relawan TIK dalam diseminasi informasi kepada masyarakat	Kab. Temanggung	77	KIM/RTIK	150.000.000	
11	Fasilitasi Pengembangan Media Center	Tercapainya diseminasi informasi, berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui mediacenter	Kab. Temanggung	8	Informasi/hari	92.500.000	11	Fasilitasi Pengembangan Media Center	Tercapainya diseminasi informasi, berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui mediacenter	Kab. Temanggung	8	Informasi/hari	92.500.000	
12	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna	Peningkatan kompetensi SDM Kominfo melalui kegiatan bimtek, kursus dan pelatihan	Kab. Temanggung	6	SDM	25.000.000	12	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna	Peningkatan kompetensi SDM Kominfo melalui kegiatan bimtek, kursus dan pelatihan	Kab. Temanggung	6	SDM	25.000.000	
13	Pembangunan Gedung untuk Pusat Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pembangunan gedung pusat ekonomi kreatif	Kab. Temanggung	1	Unit	1.350.000.000	13	Pembangunan Gedung untuk Pusat Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pembangunan gedung pusat ekonomi kreatif	Kab. Temanggung	1	Unit	1.350.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
14	Fasilitasi Kegiatan Ban-Keu	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan gedung puskomkref yang bersumber dari Bankeu	Kab. Temanggung	1	Paket	150.000.000	14	Fasilitasi Kegiatan Ban-Keu	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan gedung puskomkref yang bersumber dari Bankeu	Kab. Temanggung	1	Paket	150.000.000	
B	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ketersediaan akses internet publik		100	%	8.598.000.000	B	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ketersediaan akses internet publik		100	%	3.598.000.000	
		Persentase ketersediaan jaringan intranet		100	%				Persentase ketersediaan jaringan intranet		100	%		
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi		30	%				Persentase sistem informasi yang terintegrasi		30	%		
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal		30	%				Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal		30	%		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi system informasi	Kab. Temanggung	456	aplikasi	385.000.000	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi system informasi	Kab. Temanggung	456	aplikasi	385.000.000	
2	Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya repeater jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Paket	130.000.000	2	Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya repeater jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Paket	130.000.000	
3	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	Paket	110.000.000	3	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	Paket	110.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	Bulan	150.000.000	4	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	Bulan	150.000.000	
5	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	Tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan DRC (Disaster Recovery Centre)	Kab. Temanggung	1 paket DRC	Desa/paket DC/DR C	875.000.000	5	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	Tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan DRC (Disaster Recovery Centre)	Kab. Temanggung	1 paket DRC	Desa/paket DC/DR C	875.000.000	
6	Penyusunan Perda	Terwujudnya Perda e-government	Kab. Temanggung	0	Perda	0	6	Penyusunan Perda	Terwujudnya Perda e-government	Kab. Temanggung	0	Perda	0	
7	Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	2 blok / 24, 400 sub domain	IP Publik domain/sub domain	98.000.000	7	Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	2 blok / 24, 400 sub domain	IP Publik domain/sub domain	98.000.000	
8	Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Tersedianya DED rencana infrastruktur jaringan fiber optik ke seluruh kantor kecamatan	Kab. Temanggung	0	-	0	8	Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Tersedianya DED rencana infrastruktur jaringan fiber optik ke seluruh kantor kecamatan	Kab. Temanggung	0	-	0	
9	Pengadaan infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	Paket	5.000.000.000	9	Pengadaan infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	0	-	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
10	Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	Bulan	90.000.000	10	Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	Bulan	90.000.000	
11	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidth LPSE , OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (e-Government)	Kab. Temanggung	700	Mpbs	1.700.000.000	11	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidth LPSE , OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (e-Government)	Kab. Temanggung	700	Mpbs	1.700.000.000	
12	Pengelolaan e-government	Terselenggarakannya pengelolaan e-government kab temanggung	Kab. Temanggung	4	Dokumen	60.000.000	12	Pengelolaan e-government	Terselenggarakannya pengelolaan e-government kab temanggung	Kab. Temanggung	4	Dokumen	60.000.000	
C	Program pengembangan data Statistik	Cakupan ketersediaan data makro daerah		100	%	475.000.000	C	Program pengembangan data Statistik	Cakupan ketersediaan data makro daerah		100	%	475.000.000	
1	Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (IHK, NTP dan PDRB Kecamatan)	Kab. Temanggung	3	Dokumen	200.000.000	1	Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (IHK, NTP dan PDRB Kecamatan)	Kab. Temanggung	3	Dokumen	200.000.000	
2	Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM dan INKESRA	Kab. Temanggung	2	Dokumen	110.000.000	2	Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM dan INKESRA	Kab. Temanggung	2	Dokumen	110.000.000	
1	Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Dokumen	100.000.000	1	Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Dokumen	100.000.000	
1	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (Sumber Data dari PD)	Kab. Temanggung	27	PD	65.000.000	1	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (Sumber Data dari PD)	Kab. Temanggung	27	PD	65.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
D	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi		100	%	165.000.000	D	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi		100	%	165.000.000	
1	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Kab. Temanggung	27	PD	165.000.000	1	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Kab. Temanggung	27	PD	165.000.000	
E	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	5.000.000	E	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	5.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKjIP, LPPD, dan RfK) + Renstra	Kab. Temanggung	10	Dokumen	5.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKjIP, LPPD, dan RfK) + Renstra	Kab. Temanggung	10	Dokumen	5.000.000	
F	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	%	273.000.000	F	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	%	273.000.000	
1	Penyediaan jasa komunikasi,	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	Bulan	22.000.000	1	Penyediaan jasa komunikasi,	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	Bulan	22.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	sumber daya air dan listrik							sumber daya air dan listrik						
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	5.000.000	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	5.000.000	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	3	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	Bulan	8.000.000	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	Bulan	8.000.000	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	Kab. Temanggung	12	Bulan	3.000.000	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	Kab. Temanggung	12	Bulan	3.000.000	
8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	Bulan	35.000.000	8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	Bulan	35.000.000	
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung dan Luar Kabupaten Temanggung	12	Bulan	75.000.000	9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung dan Luar Kabupaten Temanggung	12	Bulan	75.000.000	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	16.000.000	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	16.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
11	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya kebersihan perkantoran	Kab. Temanggung	12	Bulan	70.000.000	11	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya kebersihan perkantoran	Kab. Temanggung	12	Bulan	70.000.000	
G	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		100	%	301.350.000	G	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		100	%	301.350.000	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Temanggung	1	Paket	100.000.000	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Temanggung	1	Paket	100.000.000	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung	1	Paket	75.000.000	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung	1	Paket	75.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	25.000.000	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	25.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian BBM, penggantian suku cadang dan STNK 1	Kab. Temanggung	12	bulan	71.350.000	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian BBM, penggantian suku cadang dan STNK 1	Kab. Temanggung	12	bulan	71.350.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	20.000.000	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	20.000.000	
H	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		100	%	12.500.000	H	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		100	%	12.500.000	
1	Pengadaan pakaian dinas	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai	Kab. Temanggung	28	Potong	12.500.000	1	Pengadaan pakaian dinas	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai	Kab. Temanggung	28	Potong	12.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Ket.
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	beserta perengkapannya							beserta perengkapannya						

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan tahun 2020 hasil Musrenbang tidak ada yang masuk menjadi urusan Dinkominfo.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinkominfo Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinkominfo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dari urusan komunikasi dan informatika adalah ***“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”***. Sedangkan sasarannya adalah ***“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”***.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2020	Target Kondisi Akhir 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	2,75	3,50
			Nilai keterbukaan informasi publik	Point	78,80	80,30

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.36 sebagai berikut:

Tabel 4.36 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target Tahun 2020	Target Kondisi Akhir 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	12	20
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	15	30
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100
	Terwujudnya pengelolaan SPBE	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	90	100
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	20	50
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	45	60
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	%	100	100
	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi (%)	%	1	1

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung. Adapun Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.37 sebagai berikut:

Tabel. 3.37
Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.792.077.849						
210.01.00	Belanja Pegawai					1.792.077.849						
210.01.001	Belanja Pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	Bulan	1.792.077.849	2.891.077.849	2.221.021.480	0	0	3.248.415.122	DAU
210.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja		Kab. Temanggung			0	0	0	0	0	0	DAU
	BELANJA LANGSUNG					5.606.000.000						
210.03.00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif		15	%	776.150.000						
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif		40	%							
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran		100	%							
210.03.001	Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase PPID badan publik yang aktif	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	30.000.000	22.949.000	24.960.000	0	0	33.000.000	DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210.03.002	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya informasi dan program kerja pemerintah kepada masyarakat melalui kesenian rakyat	Kab. Temanggung	4	Kegiatan	65.000.000	79.158.000	99.840.000	0	0	71.500.000	DAU
210.03.003	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Penambahan dan pengembangan perangkat media center kominfo untuk mendukung fungsi diseminasi informasi kepada masyarakat	Kab. Temanggung	1	Paket	35.000.000	50.000.000	38.500.000	0	0	38.500.000	DAU
210.03.004	Pemeliharaan Alat Studio	Terpeliharanya perangkat media center kominfo	Kab. Temanggung	1	Paket	14.000.000	15.000.000	19.210.000	0	0	15.400.000	DAU
210.03.005	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	Terlaksananya pembinaan kepada lembaga penyiaran; Peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	Kab. Temanggung	3	Kegiatan	30.000.000	40.132.500	39.330.000	0	0	33.000.000	DAU
210.03.006	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	Peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat, khususnya UKM; Peningkatan taraf perekonomian UKM dan masyarakat	Kab. Temanggung	12	Bulan	175.000.000	171.535.000	78.900.000	0	0	99.000.000	DAU
210.03.007	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	Peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat	Kab. Temanggung	128/2200	Kegiatan	41.650.000	63.000.000	67.800.000	0	0	69.300.000	DAU
210.03.008	Fasilitasi Internet Sehat dan Aman	Peningkatan pemahaman masyarakat akan internet sehat dan aman	Kab. Temanggung	4/350	Kegiatan	18.000.000	19.340.000	48.785.000	0	0	19.800.000	DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210.03.009	Pelayanan Informasi Publik	Terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	Kab. Temanggung	12	Bulan	100.000.000	64.623.000	155.950.000	0	0	110.000.000	DAU
210.03.010	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	Peningkatan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) / Relawan TIK dalam diseminasi informasi kepada masyarakat	Kab. Temanggung	77	KIM/RTIK	150.000.000	26.097.500	39.760.000	0	0	26.400.000	DAU
210.03.011	Fasilitasi Pengembangan Media Center	Tercapainya diseminasi informasi, berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui mediacenter	Kab. Temanggung	8	Informasi/hari	92.500.000	92.205.000	99.920.000	0	0	101.750.000	DAU
210.03.012	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna	Peningkatan kompetensi SDM Kominfo melalui kegiatan bimtek, kursus dan pelatihan	Kab. Temanggung	6	SDM	25.000.000	25.000.000	15.000.000	0	0	27.500.000	DAU
210.03.014	Fasilitasi Kegiatan Ban-Keu					0	0	0	0	0	0	DAU
210.04.00	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ketersediaan akses internet publik		100	%	3.598.000.000						
		Persentase ketersediaan jaringan intranet		100	%							
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi		30	%							
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal		30	%							

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210.04.001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi system informasi	Kab. Temanggung	456	aplikasi	385.000.000	285.776.900	225.620.000	0	0	285.776.900	DAU
210.04.002	Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya repeater jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Paket	130.000.000	144.172.110	249.771.000	0	0	143.000.000	DAU
210.04.003	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	Paket	110.000.000	193.052.930	249.880.000	0	0	121.000.000	DAU
210.04.004	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	Bulan	150.000.000	194.388.500	85.000.000	0	0	165.000.000	DAU
210.04.005	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	Tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan DRC (Disaster Recovery Centre)	Kab. Temanggung	1 paket DRC	Desa/paket DC/DRC	875.000.000	510.855.920	74.880.000	0	0	143.000.000	DAU
210.04.006	Penyusunan Perda	Terwujudnya Perda e-government	Kab. Temanggung	0	Perda	0	18.586.000	0	0	0	0	DAU
210.04.007	Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	2 blok / 24, 400 sub domain	IP Publik domain/sub domain	98.000.000	107.311.100	124.800.000	0	0	107.800.000	DAU
210.04.008	Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Tersedianya DED rencana infrastruktur jaringan fiber optik ke seluruh kantor kecamatan	Kab. Temanggung	0	Dokumen	0	74.921.800	0	0	0	0	DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210.04.009	Pengadaan infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	Paket	0	0	2.844.886.100	0	0	5.000.000.000	DAU
210.04.010	Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	Bulan	90.000.000	92.224.000	74.654.000	0	0	99.000.000	DAU
210.04.011	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (e-Government)	Kab. Temanggung	700	Mpbs	1.700.000.000	1.735.696.200	1.499.800.000	0	0	1.870.000.000	DAU
210.04.012	Pengelolaan e-government	Terselenggarakannya pengelolaan e-government kab temanggung	Kab. Temanggung	4	Dokumen	60.000.000	68.360.000	0	0	0	66.000.000	DAU
214.01.00	Program pengembangan data Statistik	Cakupan ketersediaan data makro daerah		100	%	475.000.000						
214.01.001	Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (IHK, NTP dan PDRB Kecamatan)	Kab. Temanggung	3	Dokumen	200.000.000	162.840.000	199.720.000	0	0	200.000.000	DAU
214.01.002	Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM dan INKESRA	Kab. Temanggung	2	Dokumen	110.000.000	116.959.000	250.000.000	0	0	121.000.000	DAU
214.01.003	Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Dokumen	100.000.000	97.213.000	100.000.000	0	0	110.000.000	DAU
214.01.004	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (Sumber Data dari PD)	Kab. Temanggung	27	PD	65.000.000	60.656.000	100.000.000	0	0	71.500.000	DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215.01.00	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi		100	%	165.000.000						
215.01.001	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Kab. Temanggung	27	PD	165.000.000	180.674.000	135.800.000	0	0	181.500.000	DAU
407.01.00	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	5.000.000						
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKjIP, LPPD, dan RfK) + Renstra	Kab. Temanggung	10	Dokumen	5.000.000	5.000.000	3.500.000	0	0	5.500.000	DAU
407.02.00	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	%	273.000.000						
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	Bulan	22.000.000	19.992.000	10.500.000	0	0	24.200.000	DAU
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	5.000.000	4.000.000	37.284.300	0	0	5.500.000	DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	15.000.000	12.400.000	0	0	16.500.000	DAU
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000	10.000.000	8.000.000	0	0	13.200.000	DAU
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000	10.000.000	7.500.000	0	0	13.200.000	DAU
407.02.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	Bulan	8.000.000	0	5.000.000	0	0	8.800.000	DAU
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	Kab. Temanggung	12	Bulan	3.000.000	2.640.000	2.700.000	0	0	3.300.000	DAU
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	Bulan	35.000.000	35.000.000	20.000.000	0	0	38.000.000	DAU
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung dan Luar Kabupaten Temanggung	12	Bulan	75.000.000	75.000.000	41.580.000	0	0	80.000.000	DAU
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	16.000.000	15.000.000	10.700.000	0	0	17.500.000	DAU
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya kebersihan perkantoran	Kab. Temanggung	12	Bulan	70.000.000	74.912.500	38.783.700	0	0	77.000.000	DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407.03.00	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		100	%	301.350.000						
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Temanggung	1	Paket	100.000.000	31.000.000	147.275.000	0	0	110.000.000	DAU
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung	1	Paket	75.000.000	50.000.000	48.300.000	0	0	80.000.000	DAU
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	25.000.000	10.000.000	18.400.000	0	0	30.000.000	DAU
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian BBM, penggantian suku cadang dan STNK 1	Kab. Temanggung	12	bulan	71.350.000	50.000.000	46.725.000	0	0	55.000.000	DAU
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	10.000.000	3.000.000	0	0	12.500.000	DAU
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	20.000.000	0	5.459.900	0	0	25.000.000	DAU
407.04.00	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		100	%	12.500.000						
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai	Kab. Temanggung	28	Potong	12.500.000	0	7.000.000	0	0	0	DAU

3.4. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Dinkominfo Kabupaten Temanggung melakukan inovasi kerja yang dalam pelaksanaannya berjalan cukup efektif. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan memberikan akses kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang sudah diterapkan dan sedang dalam persiapan untuk menunjang kinerja Dinkominfo adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan Puskomkref

Pusat Komunitas Kreatif merupakan gedung yang difasilitasi dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperuntukkan khususnya bagi para UMKM dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan kreatifitas, memberi kemudahan dalam pencarian dan penyebaran informasi, serta mempercepat upaya perdagangan komoditas unggulan UMKM melalui Bisnis Online. Sehingga melalui sarana ini para UKM dapat mengambil manfaat sehingga membantu transformasi dari manual bisnis menjadi e-bisnis yang merupakan faktor esensial dalam era bisnis masa depan yang memiliki daya saing tinggi.

Bidang Kominfo telah menjadwalkan setiap bulannya dengan mengadakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti, pembuatan blog, website, video promosi, belajar aplikasi office, dan aplikasi lainnya, serta memberikan sertifikat pelatihan dan kartu member.

Saat ini sudah dibangun 7 Pusat Komunitas Kreatif di seluruh Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, pembangunan pertama Pusat Komunikasi Kreatif pada tahun 2010 di Kabupaten Lombok Utara, 2011 di Kabupaten Lamongan, 2012 di Palangkaraya, di Parepare dan Payakumbuh pada tahun 2013 sedangkan tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Temanggung yang pertama di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun visi Puskomkref adalah "*Mewujudkan UKM dan Masyarakat Temanggung yang memiliki literasi TIK yang maju dan modern, sesuai dengan kearifan local*". Visi tersebut didukung dengan beberapa misi yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan penguasaan TIK UKM dan Masyarakat Temanggung
- b. Meningkatkan pemanfaatan TIK oleh UKM dan Masyarakat Temanggung
- c. Mewujudkan *transformasi* bisnis pelaku UKM Temanggung
- d. Memperluas area promosi produk UKM Kabupaten Temanggung
- e. Meningkatkan kualitas produk dan daya saing UKM Temanggung
- f. Meningkatkan taraf perekonomian UKM Temanggung

2) Implementasi sertifikat elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang diperlukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah dan cukup praktis karena kita tidak perlu membawa banyak materiil untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen, namun cukup membawa sebuah token ataupun dongle.

Sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

Pemanfaatan sertifikat elektronik di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang menyebutkan setiap penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik.

3) Mobile city branding

Mobile city branding merupakan suatu media informasi dan pelayanan terpadu, yaitu sebuah portal informasi untuk publik yang dapat diakses terpadu satu platform, dari dalam (internal) atau luar (eksternal) bagi organisasi. Dengan platform informasi dan pelayanan publik yang terpadu, masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan publik, potensi daerah, informasi pariwisata, dan informasi lainnya yang resmi dari pemerintah Kabupaten Temanggung.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat telah memaksa organisasi untuk membangun berbagai fasilitas teknologi sistem informasi sebagai tulang punggung utama dalam mengembangkan sebuah sistem informasi organisasi yang handal dan berkualitas. Salah satu tolok ukur kematangan pengembangan e_government di suatu daerah adalah dengan adanya layanan informasi dan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi, dengan menerapkan interoperabilitas antar sistem yang akan membantu proses pengumpulan informasi dan pelayanan antar OPD. Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan.

4) E-statistik

E-statistik adalah publikasi data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dalam bentuk digital yang yang dapat diakses untuk kepentingan pemerintah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan, disamping itu dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari informasi mengenai data statistik. Aplikasi ini terdiri dari dua jenis yaitu e-statistik berbasis web yang berisikan data-data statistik sektoral dalam bentuk rekapitulasi dan e-statistik yang berbasis android merupakan aplikasi mobile yang dapat diakses lewat gadget yang berisikan data-data statistik sektoral dari OPD, instansi vertikal dan instansi swasta dilingkup Kabupaten Temanggung.

BAB IV PENUTUP

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi *cybercity* ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Renja Dinkominfo Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung yang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinkominfo Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan komunikasi dan informatika bagi seluruh unit kerja dan stakeholder bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Temanggung secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.
- 2) Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung dijabarkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
- 3) Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dokumen Renja ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dan dalam upaya pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana termaktub dalam Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Selanjutnya Renja Tahun 2020 ini akan digunakan sebagai acuan bagi pembangunan pada urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dalam implementasinya tidak terlepas dari kaidah pelaksanaannya yaitu sebagai pedoman untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan pada tahun berjalan.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Dinkominfo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.792.077.849,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.606.000.000,- dengan jumlah program sebanyak 8 program, yaitu:

- 1) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 2) Program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya guna;
- 3) Program pengembangan data statistik;
- 4) Program penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 5) Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah;
- 6) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- 7) Program peningkatan sarana prasarana aparatur; dan
- 8) Program peningkatan disiplin aparatur.

Perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan. Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197310081992032001

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2020

PD : 2.10.01.00-Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.792.077.849				
210:01:00	Belanja Pegawai					1.792.077.849				
210.01.001	Belanja Pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	Bulan	1.792.077.849	2.891.077.849	2.221.021.480	-	-
210.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja		Kab. Temanggung			-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG					5.606.000.000	5.130.271.960	7.416.874.000	-	-
210:03:00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif		15	%	776.150.000	669.040.000	727.955.000	-	-
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif		40	%					
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran		100	%					
210.03.001	Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase PPID badan publik yang aktif	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	30.000.000	22.949.000	24.960.000	-	-
210.03.002	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya informasi dan program kerja pemerintah kepada masyarakat melalui kesenian rakyat	Kab. Temanggung	4	Kegiatan	65.000.000	79.158.000	99.840.000	-	-
210.03.003	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Penambahan dan pengembangan perangkat media center kominfo untuk mendukung fungsi diseminasi informasi kepada masyarakat	Kab. Temanggung	1	Paket	35.000.000	50.000.000	38.500.000	-	-
210.03.004	Pemeliharaan Alat Studio	Terpeliharanya perangkat media center kominfo	Kab. Temanggung	1	Paket	14.000.000	15.000.000	19.210.000	-	-
210.03.005	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	Terlaksananya pembinaan kepada lembaga penyiaran; Peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	Kab. Temanggung	3	Kegiatan	30.000.000	40.132.500	39.330.000	-	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.03.006	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	Peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat, khususnya UKM; Peningkatan taraf perekonomian UKM dan masyarakat	Kab. Temanggung	12	Bulan	175.000.000	171.535.000	78.900.000	-	-
210.03.007	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	Peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat	Kab. Temanggung	128/2200	Kegiatan	41.650.000	63.000.000	67.800.000	-	-
210.03.008	Fasilitasi Internet Sehat dan Aman	Peningkatan pemahaman masyarakat akan internet sehat dan aman	Kab. Temanggung	4/350	Kegiatan	18.000.000	19.340.000	48.785.000	-	-
210.03.009	Pelayanan Informasi Publik	Terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	Kab. Temanggung	12	Bulan	100.000.000	64.623.000	155.950.000	-	-
210.03.010	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	Peningkatan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) / Relawan TIK dalam diseminasi informasi kepada masyarakat	Kab. Temanggung	77	KIM/RTIK	150.000.000	26.097.500	39.760.000	-	-
210.03.011	Fasilitasi Pengembangan Media Center	Tercapainya diseminasi informasi, berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui mediacenter	Kab. Temanggung	8	Informasi/har	92.500.000	92.205.000	99.920.000	-	-
210.03.012	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna	Peningkatan kompetensi SDM Kominfo melalui kegiatan bimtek, kursus dan pelatihan	Kab. Temanggung	6	SDM	25.000.000	25.000.000	15.000.000	-	-
210.03.014	Fasilitasi Kegiatan Ban-Keu					-	-	-	-	-
210:04:00	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ketersediaan akses internet publik		100	%	3.598.000.000	3.425.345.460	5.429.291.100	-	-
		Persentase ketersediaan jaringan intranet		100	%					
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi		30	%					
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal		30	%					
210.04.001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi system informasi	Kab. Temanggung	456	aplikasi	385.000.000	285.776.900	225.620.000	-	-
210.04.002	Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya repeater jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Paket	130.000.000	144.172.110	249.771.000	-	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.04.003	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	Paket	110.000.000	193.052.930	249.880.000	-	-
210.04.004	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	Bulan	150.000.000	194.388.500	85.000.000	-	-
210.04.005	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	Tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan DRC (Disaster Recovery Centre)	Kab. Temanggung	paket DR/paket DC/D		875.000.000	510.855.920	74.880.000	-	-
210.04.006	Penyusunan Perda	Terwujudnya Perda e-government	Kab. Temanggung	0	Perda	-	18.586.000	-	-	-
210.04.007	Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	24, 400 suk domain/sub		98.000.000	107.311.100	124.800.000	-	-
210.04.008	Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Tersedianya DED rencana infrastruktur jaringan fiber optik ke seluruh kantor kecamatan	Kab. Temanggung	0	Dokumen	-	74.921.800	-	-	-
210.04.009	Pengadaan infrastruktur Jaringan Fiber Optik	Terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	Paket	-	-	2.844.886.100	-	-
210.04.010	Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	Bulan	90.000.000	92.224.000	74.654.000	-	-
210.04.011	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidth LPSE , OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (e-Government)	Kab. Temanggung	700	Mpbs	1.700.000.000	1.735.696.200	1.499.800.000	-	-
210.04.012	Pengelolaan e-government	Terselenggarakannya pengelolaan e-government kab temanggung	Kab. Temanggung	4	Dokumen	60.000.000	68.360.000	-	-	-
214:01:00	Program pengembangan data Statistik	Cakupan ketersediaan data makro daerah		100	%	475.000.000	437.668.000	649.720.000	-	-
214.01.001	Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (IHK, NTP dan PDRB Kecamatan)	Kab. Temanggung	3	Dokumen	200.000.000	162.840.000	199.720.000	-	-
214.01.002	Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM dan INKESRA	Kab. Temanggung	2	Dokumen	110.000.000	116.959.000	250.000.000	-	-
214.01.003	Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Dokumen	100.000.000	97.213.000	100.000.000	-	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.01.004	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (Sumber Data dari PD)	Kab. Temanggung	27	PD	65.000.000	60.656.000	100.000.000	-	-
215:01:00	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi		100	%	165.000.000	180.674.000	135.800.000	-	
215.01.001	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Kab. Temanggung	27	PD	165.000.000	180.674.000	135.800.000	-	-
407:01:00	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	5.000.000	5.000.000	3.500.000		
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKjIP, LPPD, dan RFK) + Renstra	Kab. Temanggung	10	Dokumen	5.000.000	5.000.000	3.500.000	-	-
407:02:00	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	%	273.000.000	261.544.500	194.448.000	-	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	Bulan	22.000.000	19.992.000	10.500.000	-	-
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	5.000.000	4.000.000	37.284.300	-	-
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	15.000.000	12.400.000	-	-
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000	10.000.000	8.000.000	-	-
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000	10.000.000	7.500.000	-	-
407.02.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	Bulan	8.000.000	-	5.000.000	-	-
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	Kab. Temanggung	12	Bulan	3.000.000	2.640.000	2.700.000	-	-
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	Bulan	35.000.000	35.000.000	20.000.000	-	-
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	75.000.000	75.000.000	41.580.000	-	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2018		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2019	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	16.000.000	15.000.000	10.700.000	-	-
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya kebersihan perkantoran	Kab. Temanggung	12	Bulan	70.000.000	74.912.500	38.783.700	-	-
407:03:00	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		100	%	301.350.000	151.000.000	269.159.900	-	-
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Temanggung	1	Paket	100.000.000	31.000.000	147.275.000	-	-
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung	1	Paket	75.000.000	50.000.000	48.300.000	-	-
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	25.000.000	10.000.000	18.400.000	-	-
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian BBM, penggantian suku cadang dan STNK 1	Kab. Temanggung	12	bulan	71.350.000	50.000.000	46.725.000	-	-
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	10.000.000	3.000.000	-	-
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	20.000.000	-	5.459.900	-	-
407:04:00	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		100	%	12.500.000	-	7.000.000	-	-
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai	Kab. Temanggung	28	Potong	12.500.000	-	7.000.000	-	-

Temanggung, 17 Juni 2019
Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

ttd

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19731008 199203 2 001

Prakiraan Maju	Sumber Dana
Rencana 2021	
12	13
3.248.415.122	DAU
-	DAU
9.944.926.900	
645.150.000	
33.000.000	DAU
71.500.000	DAU
38.500.000	DAU
15.400.000	DAU
33.000.000	DAU

Prakiraan Maju	Sumber Dana
Rencana 2021	
12	13
99.000.000	DAU
69.300.000	DAU
19.800.000	DAU
110.000.000	DAU
26.400.000	DAU
101.750.000	DAU
27.500.000	DAU
-	DAU
8.000.576.900	
285.776.900	DAU
143.000.000	DAU

Prakiraan Maju	Sumber Dana
Rencana 2021	
12	13
121.000.000	DAU
165.000.000	DAU
143.000.000	DAU
-	DAU
107.800.000	DAU
-	DAU
5.000.000.000	DAU
99.000.000	DAU
1.870.000.000	DAU
66.000.000	DAU
502.500.000	
200.000.000	DAU
121.000.000	DAU
110.000.000	DAU

Prakiraan Maju	Sumber Dana
Rencana 2021	
12	13
71.500.000	DAU
181.500.000	
181.500.000	DAU
5.500.000	
5.500.000	DAU
297.200.000	
24.200.000	DAU
5.500.000	DAU
16.500.000	DAU
13.200.000	DAU
13.200.000	DAU
8.800.000	DAU
3.300.000	DAU
38.000.000	DAU
80.000.000	DAU

Prakiraan Maju	Sumber Dana
Rencana 2021	
12	13
17.500.000	DAU
77.000.000	DAU
312.500.000	
110.000.000	DAU
80.000.000	DAU
30.000.000	DAU
55.000.000	DAU
12.500.000	DAU
25.000.000	DAU
-	
-	DAU